

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM

Mengacu hasil analisis isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam Bab IV Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 tentang Analisis Isu-isu Strategis, khususnya dalam bidang ekonomi, maka diperoleh kesimpulan permasalahan dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Pati sebagaimana Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pati

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan; dan pengembangan UMK yang prolingkungan (<i>green economy</i>);	<p>1. Masih rendahnya pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi</p> <p>2. Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat</p>	<p>- Masih rendahnya pertumbuhan usaha mikro baru.</p> <p>- Masih rendahnya peningkatan skala usaha bagi usaha mikro.</p> <p>- Masih kurangnya peningkatan KUB/klaster skala usaha mikro.</p> <p>- Masih kurangnya jejaring usaha oleh KUB klaster usaha mikro.</p> <p>- Masih rendahnya manajemen koperasi.</p> <p>- Belum semua Koperasi di Kabupaten Pati yg berkinerja baik</p>

Penjelasan terhadap permasalahan sebagaimana tabel 3.1 di atas adalah :

1. Masih rendahnya pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi lebih disebabkan oleh masih rendahnya pertumbuhan Usaha Mikro baru, masih rendahnya peningkatan skala usaha bagi Usaha Mikro, masih kurangnya peningkatan KUB/klaster skala Usaha Mikro, dan masih kurangnya jejaring usaha oleh KUB klaster Usaha Mikro. Berdasarkan perhitungan pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (*“naik*

kelas”) dari tahun 2016 ke tahun 2017 hanya berjumlah 113 unit atau sebesar 0,3 persen dari total Usaha Mikro sebesar 48.111 unit di tahun 2016 (Tabel 3.2).

Tabel 3.2.
Peertumbuhan Usaha Mikro Kabupaten Pati
Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Jumlah Usaha Mikro	21.748	22.707	22.717	30.911	48.111	53.227	
2.	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro (%)	-	4	0,04	36	56	11	
3.	Rata-rata Pertumbuhan Usaha Mikro 2013 – 2017 (%)							21
4.	UM Naik Kelas UK (2016 – 2017) terhadap Jumlah UM (2016)							0,3

- Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat disebabkan oleh faktor manajemen koperasi yang belum profesional dan belum semua koperasi di Kabupaten Pati yg berkinerja baik, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Perkembangan Kinerja Koperasi Kabupaten Pati
Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Koperasi Aktif	740	809	821	577	593
2.	Persentase Koperasi Aktif (%)	70	75	75	51	52
4.	Jumlah Koperasi Sehat	16	0	2	1	12
5.	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat (%)		(-100)	0	(-50)	2

- Ketersediaan data yang akurat juga menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengembangan Usaha Mikro. Hal tersebut menyebabkan efektivitas pembinaan Usaha Mikro belum optimal. Oleh karena itu, strategi pengembangan Usaha Mikro harus dimulai dengan penyediaan data dukung yang akurat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pati

1. Visi Bupati–Wakil Bupati Pati terpilih Tahun 2017 – 2022 adalah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik. Efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Bidang Koperasi dan Pengembangan Usaha Mikro berkorelasi positif terhadap pencapaian Visi Kepala Daerah terpilih khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Misi Bupati–Wakil Bupati Pati terpilih Tahun 2017 – 2022 dalam upaya untuk mewujudkan visinya adalah :
 - a. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
 - d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
 - e. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
 - f. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
 - g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
 - h. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan;

Terkait dengan misi tersebut di atas, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro diproyeksikan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian misi yang kelima yaitu meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja. Skala Usaha Mikro yang terus meningkat dan berkembang dapat menciptakan peluang kerja yang semakin banyak bagi masyarakat dan tentunya arus investasi masuk juga akan semakin besar.
3. Permasalahan dalam pengembangan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dapat mengganggu dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah lima tahun ke depan. Ada faktor pendorong dan penghambat bagi Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberikan pelayanan publik.

a. Faktor Pendorong

Faktor pendorong yang dapat membantu terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah adalah :

- Koperasi dan UMKM menjadi salah bidang prioritas unggulan Pemerintah Kabupaten Pati yang akan diintervensi dalam bentuk program dan kegiatan.
- Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya program pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

b. Faktor Penghambat

- Minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro karena masih adanya ego sektoral.
- Masih minimnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Perencanaan program dan kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro masih belum efektif dan efisien.
- Masih banyaknya manajemen Koperasi dan Usaha Mikro yang belum mendasarkan pada prinsip kewirausahaan.
- Masih adanya *moral hazard* dalam pengelolaan koperasi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

1. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

- a. Visi Kementerian Koperasi dan UKM diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden terpilih periode 2014 – 2019 yaitu Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Kemandirian ekonomi yang ditopang dengan semakin meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional. Asas kegotongroyongan sangat melekat pada prinsip dalam menjalankan koperasi.
- b. Agenda Nasional sebagaimana tertuang dalam Nawacita untuk mewujudkan Visi Presiden terpilih yaitu :
 - 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari 9 (sembilan) nawacita yang dicanangkan pemerintah, ada 3 (tiga) agenda Nasional yang langsung terkait dan menjadi agenda prioritas Kementerian Koperasi dan UKM yaitu

- 1) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, yang diarahkan untuk :
 - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, membuat laporan kinerja, dan membuka akses informasi publik.
 - Menjalankan agenda reformasi publik dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervise atas kinerja pelayanan publik.
 - Membuka ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik.
- 2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, diarahkan untuk :

- Membangun pasar tradisional sebanyak 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada.
 - Membangun sejumlah *Science dan Techno Park* di daerah-daerah.
 - Meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni, industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim, dan pariwisata.
- 3) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, diarahkan untuk :
- Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pendirian Bank Petani dan UMKM.
- c. Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian adalah Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan adalah :
- 1) Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri.
 - 2) Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya.
 - 3) Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan.
 - 4) Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat.
 - 5) Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya.

- 6) Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha.
 - 7) Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.
- d. Sasaran untuk mewujudkan tujuan Kementerian :
- 1) Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan.
 - 2) Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM.
 - 3) Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan.
 - 4) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat.
- e. Faktor Pendorong dan Penghambat bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut :
- 1) Faktor Pendorong
 - Koperasi dan UMKM menjadi salah bidang prioritas unggulan yang akan diintervensi dalam bentuk program dan kegiatan.
 - Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya program pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
 - 2) Faktor Penghambat
 - Minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro karena masih adanya ego sektoral.
 - Masih minimnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
 - Perencanaan program dan kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro masih belum efektif dan efisien.
 - Masih banyaknya manajemen Koperasi dan Usaha Mikro yang belum mendasarkan pada prinsip kewirausahaan.
 - Masih adanya *moral hazard* dalam pengelolaan koperasi.

2. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

- a. Visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah terpilih Tahun 2013 – 2018 yaitu Sejahtera Bersama Koperasi dan UMKM. Hal ini ditujukan sebagai upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat Koperasi dan UMKM melalui sinergisitas antara pemerintah, masyarakat serta segenap pemangku kepentingan lainnya.
- b. Visi Dinas Koperasi dan UMKM, diterjemahkan ke dalam Misi sebagai berikut :
 - 1) Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat.
 - 2) Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang berdaya saing.
 - 3) Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.
 - 4) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten.
 - 5) Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM.
- c. Misi Dinas Koperasi dan UMKM diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran dinas secara lebih spesifik sebagai berikut :
 - 1) Misi I :
 Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat
 Tujuan :
 Meningkatkan peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah.
 Sasaran :
 Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah.
 - 2) Misi II :
 Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang berdaya saing
 Tujuan :
 - Meningkatkan Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah.
 - Meningkatkan daya saing KUMKM di Jawa Tengah.

Sasaran :

- Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah.
- Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah.

3) Misi III :

Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja

Tujuan :

- Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM

Sasaran :

- Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah
- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi dan UMKM.

4) Misi IV :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten

Tujuan :

Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM

Sasaran :

Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM.

5) Misi V :

Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM

Tujuan :

- Meningkatkan kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKM
- Meningkatkan kualitas SDM Aparatur

Sasaran :

- Meningkatnya kualitas serta integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur

d. Faktor Pendorong dan Penghambat bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1) Faktor Pendorong

- Koperasi dan UMKM menjadi salah bidang prioritas unggulan yang akan diintervensi dalam bentuk program dan kegiatan.
- Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya program pemberdayaan koperasi dan UMKM.

2) Faktor Penghambat

- Minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro karena masih adanya ego sektoral.
- Masih minimnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Perencanaan program dan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro masih belum efektif dan efisien.
- Masih banyaknya manajemen Koperasi dan Usaha Mikro yang belum mendasarkan pada prinsip kewirausahaan.
- Masih adanya *moral hazard* dalam pengelolaan koperasi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

1. Telaahan terhadap Kebijakan Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang bersinggungan dengan pemanfaatan ruang wilayah (spasial) harus mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030. Hal ini yang harus menjadi pemahaman seluruh pemangku kepentingan karena konsep pembangunan (berbagai sektor) berbasis spasial/kewilayahan sudah menjadi *mainstream* di dunia.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RTRW Kabupaten Pati telah diatur rencana sistem perwilayahan untuk memudahkan distribusi program pembangunan sesuai dengan karakter kawasan yang terbagi ke dalam 6 (enam) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) sebagai berikut :

- a. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Pati meliputi : Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, dan Kecamatan Gabus;

- b. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) II dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Trangkil meliputi : Kecamatan Trangkil, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan Margoyoso;
- c. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) III dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Tayu meliputi : Kecamatan Tayu, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gunungwungkal , dan Kecamatan Dukuhseti;
- d. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Juwana meliputi : Kecamatan Juwana, Kecamatan Wedarijaksa, dan Kecamatan Batangan;
- e. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) V dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Jakenan meliputi : Kecamatan Jakenan, Kecamatan Jaken, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Pucakwangi; dan
- f. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VI dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Kayen meliputi : Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Tambakromo.

Terkait dengan hal tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati wajib memedomani aturan pemanfaatan ruang kaitannya dengan aktivitas pengembangan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Perencanaan pembangunan dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro perlu memahami tentang struktur ruang dan pola ruang yang telah diatur. Struktur ruang dalam penerapan kebijakan Koperasi dan Usaha Mikro erat kaitannya dengan konektivitas antar wilayah sebagai prasyarat untuk kemudahan mobilitas dan distribusi/penyaluran hasil produksi. Sedangkan pola ruang berhubungan dengan segala potensi sumber daya ekonomi lokal yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan nilai ekonomi sekaligus sebagai pendorong terciptanya peningkatan skala ekonomi baik dari aspek pengembangan Koperasi maupun Usaha Mikro.

Berhubungan dengan implementasi kebijakan tata ruang daerah, permasalahan mendasar yang ada adalah bersifat teknis yaitu belum tersedianya peraturan daerah yang merupakan turunan Perda Tata Ruang Daerah yang menjadi acuan operasional kebijakan tata ruang

bagi para stakeholder, dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selain itu aparat sipil khususnya yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah yang berada di OPD masih banyak yang belum memahami seluk beluk kebijakan tata ruang daerah. Demikian pula dengan masyarakat umum yang seringkali dalam aktivitas kehidupannya berbenturan dengan aturan terkait dengan pemanfaatan ruang/lahan. Hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam upaya sinergitas kebijakan pemerintah daerah di bidang tata ruang wilayah. Dari perspektif positif yang menjadi faktor pendorong terhadap Perda terkait kebijakan penataan ruang adalah bahwa pengembangan struktur ruang yang berhubungan dengan konektivitas antar wilayah secara fisik telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati, sehingga hal ini dapat meningkatkan nilai ekonomi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Selain itu juga telah disediakan suatu rencana pengembangan pola ruang sebagai wahana untuk aktualisasi kegiatan ekonomi secara optimal berbasis potensi sumber daya lokal. Ini dapat menjadi suatu jaminan kepastian dalam berusaha/berbisnis khususnya pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro daerah.

2. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Mengacu pada isu daerah di bidang ekonomi sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022, pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro harus berorientasi pada kelestarian lingkungan (*green economy*). Upaya untuk mewujudkan itu dapat dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang dilandaskan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga dalam prakteknya ke depan, setiap aktivitas ekonomi oleh masyarakat dalam skala usaha apapun (besar, menengah, kecil maupun mikro atau rumah tangga) harus senantiasa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Hal tersebut di atas penting untuk dilakukan, dengan pertimbangan bahwa (1) kapasitas SDM pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro relatif masih kurang sehingga sangat berpengaruh terhadap manajemen usaha yang ramah lingkungan; (2) jumlah pelaku usaha di dua sektor ini sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten sehingga cukup menyulitkan dalam hal

pengecehan dan pengendalian pelanggaran terhadap lingkungan; (3) minimnya SDM ASN pengampu bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Faktor-faktor inilah yang dapat menjadi penghambat dalam upaya menciptakan pembangunan ekonomi berbasis lingkungan. Di lain pihak terdapat faktor pendorong untuk menciptakan *green economy* antara lain adalah (1) adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap upaya menciptakan aktivitas ekonomi yang berwawasan lingkungan; (2) meningkatnya peran serta masyarakat dalam bentuk aktivitas yang peduli lingkungan; (3) adanya perhatian/dukungan internasional bagi setiap entitas atau kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas berbasis lingkungan; (4) adanya tuntutan pasar internasional terhadap produk industri yang ramah lingkungan.

3.5 Isu-Isu Strategis Pelayanan Koperasi dan UMKM

Berikut *review* atas beberapa permasalahan terkait faktor-faktor pendorong maupun penghambat terhadap pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati dari sudut pandang gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah kementerian/lembaga terkait, sasaran jangka menengah OPD provinsi terkait, implikasi RTRW bagi pelayanan OPD dan implikasi KLHS bagi pelayanan OPD.

Tabel 3.4
Isu-isu Strategis Pelayanan Koperasi dan UMKM

Review Aspek	Uraian	Isu-isu
Gambaran pelayanan OPD	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro secara lebih berkualitas. - Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro. - Peningkatan pendampingan pelayanan perizinan bagi Koperasi dan Usaha Mikro. - Pengembangan model kewirausahaan pada Koperasi dan Usaha Mikro. - Peningkatan jejaring bisnis untuk mendorong kerjasama usaha dan pemasaran. - Peningkatan pengawasan dan penilaian lembaga koperasi. 	<ul style="list-style-type: none"> -Penguatan basis data Usaha Mikro. -Penguatan kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro. -Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro berbasis kewirausahaan. -Peningkatan jejaring bisnis.
Sasaran jangka menengah kementerian/lembaga terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM. - Masih rendahnya daya saing Koperasi dan UMKM sehingga belum mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (“naik kelas”) dan berdaya saing. - Kurangnya Koperasi dan UMKM yg 	-

Review Aspek	Uraian	Isu-isu
	bisa bertahan dan tumbuh ke skala lebih besar/("naik kelas")	
Sasaran jangka menengah OPD provinsi terkait	<p>Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan OPD untuk mendukung capaian sasaran jangka menengah K/L dan OPD Provinsi terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi dan UMKM menjadi salah satu bidang prioritas unggulan Pemerintah Kabupaten Pati yang akan diintervensi dalam bentuk program dan kegiatan. - Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya program pemberdayaan Koperasi dan UMKM. - Minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro karena masih adanya ego sektoral. - Masih minimnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. - Perencanaan program dan kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro masih belum efektif dan efisien. - Masih banyaknya manajemen Koperasi dan Usaha Mikro yang belum mendasarkan pada prinsip kewirausahaan. - Masih adanya <i>moral hazard</i> dalam pengelolaan koperasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi antar OPD untuk memperkuat integrasi perencanaan pembangunan. - Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN pengampu bidang Koperasi dan UMKM.
Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD	<p>Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan OPD terhadap implikasi RTRW :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan struktur ruang yang berhubungan dengan konektivitas antar wilayah secara fisik telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati, sehingga hal dapat meningkatkan nilai ekonomi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro. - Rencana pengembangan pola ruang sebagai wahana untuk aktualisasi kegiatan ekonomi secara optimal berbasis potensi sumber daya lokal. - Belum tersedianya peraturan daerah yang merupakan turunan perda tata ruang daerah yang menjadi acuan operasional kebijakan tata ruang bagi para stakeholder, dalam bentuk rencana detail tata ruang (RDTR). - ASN khususnya yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah yang berada di OPD masih banyak yang belum memahami seluk beluk kebijakan tata ruang daerah. 	Peningkatan pemahaman ASN dan pelaku usaha mikro dan koperasi terhadap implikasi RTRW

Review Aspek	Uraian	Isu-isu
	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat umum yang seringkali dalam aktivitas kehidupannya berbenturan dengan aturan terkait dengan pemanfaatan ruang/lahan. 	
Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD	<p>Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan OPD terhadap implikasi KLHS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dan komitmen dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap upaya menciptakan aktivitas ekonomi yang berwawasan lingkungan. - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bentuk aktivitas yang peduli lingkungan. - Adanya perhatian/dukungan internasional bagi setiap entitas atau kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas berbasis lingkungan. - Adanya tuntutan pasar internasional terhadap produk industri yang ramah lingkungan. - Kapasitas SDM pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro relatif masih kurang sehingga sangat berpengaruh terhadap manajemen usaha yang ramah lingkungan. - Jumlah pelaku usaha di dua sektor ini sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten sehingga cukup menyulitkan dalam hal pencegahan dan pengendalian pelanggaran terhadap lingkungan. - Minimnya SDM ASN pengampu bidang koperasi dan usaha mikro 	<ul style="list-style-type: none"> - Tren permintaan pasar international terhadap produk ramah lingkungan. - Manajemen usaha berorientasi pada kelestarian lingkungan.

Dari hasil *review* terhadap beberapa tinjauan aspek serta mengacu pada arus utama isu-isu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pati beserta lingkungan eksternal yang mempengaruhinya, maka diperoleh isu-isu strategis yang memiliki dampak terhadap keberhasilan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan dan basis data Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Peningkatan manajemen usaha berbasis kewirausahaan dan jejaring bisnis;
3. Peningkatan koordinasi antar OPD untuk memperkuat integrasi perencanaan pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN pengampu bidang Koperasi dan UMKM.
5. Manajemen usaha berorientasi pada kelestarian lingkungan.